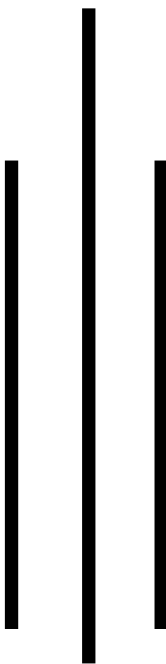




KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMETAAN PNS POTENSIAL UNTUK MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN
TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018

**KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PEMETAAN PNS POTENSIAL UNTUK MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN
TINGGI, ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2019**

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 821.22/5992/SJ tanggal 29 Oktober 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 Tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
- k. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dan Mekanisme Promosi dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Reformasi birokrasi bidang kepegawaian mencakup 4 (empat) area yaitu SDM Aparatur, *performance* manajemen, reformasi regulasi dan modernisasi. Keempat area ini diharapkan akan saling bersinergi sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang berdayaguna dan berhasilguna dalam penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Dari keempat area tersebut, SDM aparatur menjadi faktor yang paling berpengaruh dan menjadi titik sentral dalam reformasi birokrasi bidang kepegawaian karena sifat SDM yang memiliki keunggulan kompetitif. Disisi lain pentingnya reformasi SDM aparatur dalam konteks reformasi kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, *capable*, profesional dan berkinerja tinggi.

Secara faktual, latar belakang reformasi kepegawaian didasarkan pada kondisi yaitu pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Pusat melalui reformasi kepegawaian telah menetapkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai amanat dari ketentuan tersebut dan implementasi rencana aksi reformasi birokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penempatan pimpinan birokrasi dengan pertimbangan *leader* sangat mempengaruhi kinerja birokrasi melakukan upaya sistem seleksi secara terbuka dan kompetitif untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Upaya ini menjadi *blue print* sebagaimana yang tertuang dalam "agenda 18" yang berisi visi, misi dan program unggulan yang menjadi prioritas dalam pencapaiannya. Salah satu program unggulan dalam bidang kepegawaian adalah reformasi birokrasi yang berbasis kompetensi dengan rencana aksi promosi terbuka dalam jabatan ASN. Program unggulan ini juga merupakan penjabaran prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 nomor 6 yaitu pematapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih dan baik.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan reformasi berbasis kompetensi maka para *leader* birokrasi harus diisi oleh PNS yang terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui sistem seleksi tersebut diharapkan para pemimpin birokrasi mampu mendayagunakan sumber-sumber birokrasi dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kegiatan "Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah" didasarkan pada pertimbangan yaitu :

- a. Bahwa guna mewujudkan program unggulan reformasi birokrasi berbasis kompetensi maka *leader* (pemimpin birokrasi) harus diisi PNS terbaik melalui sistem seleksi yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel;
- b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dalam penataan Jabatan Pimpinan Tinggi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Guna mendapatkan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang transparan, obyektif, berkeadilan dan akuntabel maka perlu dilakukan penyempurnaan sistem seleksi secara berkesinambungan;
- d. Guna mendukung Peningkatan Kualitas penyelenggaraan Seleksi Terbuka di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan pembinaan dan perbaikan dalam proses pengisian dan pelaksanaan kegiatan dimaksud, yang dilakukan dalam bentuk Sosialisasi/Rapat Koordinasi dengan mendatangkan Narasumber dari KASN, Kementerian PAN RB dan Kementerian Dalam Negeri;
- e. Sebagai upaya mendukung percepatan pelaksanaan merit sistem di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya untuk melakukan perbaikan dalam sisi pelaksanaan pengisian jabatan secara terbuka, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang mengatur tentang Seleksi Terbuka, dan mengatur juga tentang Talent Pool JPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- f. Agar pelaksanaan kebijakan seleksi secara terbuka dan mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan konsultasi dan koordinasi pelaksanaannya dengan instansi pusat terkait.

2. Tujuan

Tujuan yang ditetapkan untuk kegiatan "Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah", yaitu :

- 1) Mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi yang terbaik memiliki kompetensi unggul, profesional dan berintegritas sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah;
- 2) Mendapatkan PNS terbaik memiliki kompetensi unggul, profesional dan berintegritas sebagai *Talent Pool* dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sehingga PNS yang dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tersebut mampu memberikan kinerja yang unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah;
- 3) Menjamin pelaksanaan penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mendapatkan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Mendukung percepatan sistem merit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan terus berupaya melakukan inovasi dan kreasi dalam pelaksanaan pengisian jabatan secara terbuka.

C. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan yang ditetapkan yaitu Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun penjabaran dari kegiatan tersebut yaitu :

- 1) Seleksi secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penataan (Mutasi dan seleksi secara terbuka) Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 4) Penyempurnaan sistem seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka, mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- 5) Konsultasi dan koordinasi pelaksanaan seleksi secara terbuka dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi serta *Talent Scouting* Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Penelusuran kader potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan "Pemetaan PNS potensial untuk menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah" yaitu :

- 1) Seleksi secara terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sasarannya PNS terbaik se Indonesia yang memenuhi persyaratan;
- 2) Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sasarannya PNS terbaik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan;
- 3) Penelusuran Kader Potensial (*Talent Scouting*) Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sasarannya adalah seluruh PNS Provinsi Jawa Tengah yang memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- 4) Penataan (Mutasi dan seleksi secara terbuka) Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sasarannya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
- 5) Sosialisasi/Rakor Seleksi Terbuka bagi Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan peserta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator yang membidangi Kepegawaian;
- 6) Harmonisasi Pergub Seleksi Terbuka dan Talent Pool JPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan sasaran penyempurnaan sistem

seleksi terbuka dengan penambahan instrumen Talent Pool JPT, sebagai upaya memperpendek pelaksanaan sistem seleksi terbuka;

E. LOKASI KEGIATAN

Pelaksanaan seluruh kegiatan di Tahun Anggaran 2019 akan dilaksanakan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL PELAKSANAAN

Tabel I
Jadwal Pelaksanaan kegiatan Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Seleksi/Mutasi Terbuka												
2.	<i>Talent Scouting</i>												
3.	Monev Pengisian JPT Pratama Kab/Kota												
4.	Sosialisasi/Rakor Seleksi Terbuka												
5.	Harmonisasi Pergub Seleksi Terbuka dan Talent Pool JPT												
6.	Penyusunan Laporan												

G. KELUARAN

Tabel I
Keluaran Program Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

NO	KEGIATAN	FISIK	NON FISIK
1.	Seleksi/Mutasi JPT	1 kali pelaksanaan	
2.	Talent Scouting Adm dan Pengawas	1 kali pelaksanaan	
3.	Monev JPT Kab/Kota	12 kali pelaksanaan	
4.	Sosialisasi/Rakor Seleksi Terbuka	1 kali pelaksanaan	
5.	Harmonisasi Pergub Seleksi Terbuka dan Talent Pool JPT	1 kali pelaksanaan	
6.	Laporan Akhir Tahun Kegiatan	1 dokumen	

H. ANGGARAN

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

I. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Disamping itu dengan adanya Kerangka Acuan Kerja kegiatan yang telah direncanakan Tahun 2019 menunjukan adanya korelasi yang signifikan dengan program prioritas pembangunan Jawa Tengah yang telah ditetapkan sesuai bidang tugasnya.

Semarang,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19630526 199503 1 002**